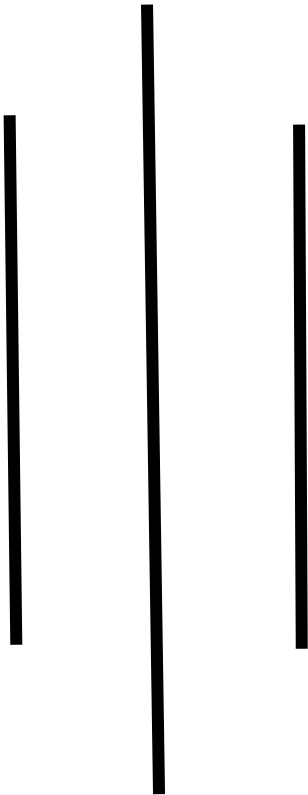




**RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2024**



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN 3

1.1 Latar Belakang 3

1.2 Landasan Hukum 4

1.3 Maksud dan Tujuan 5

1.4 Sistematika Penulisan 6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN LALU 7

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan
Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup 7

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup 21

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas
Lingkungan Hidup 25

2.4 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD 28

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 44

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 48

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 48

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup 49

3.3 Program dan Kegiatan 50

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAANYA 76

BAB V PENUTUP 77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

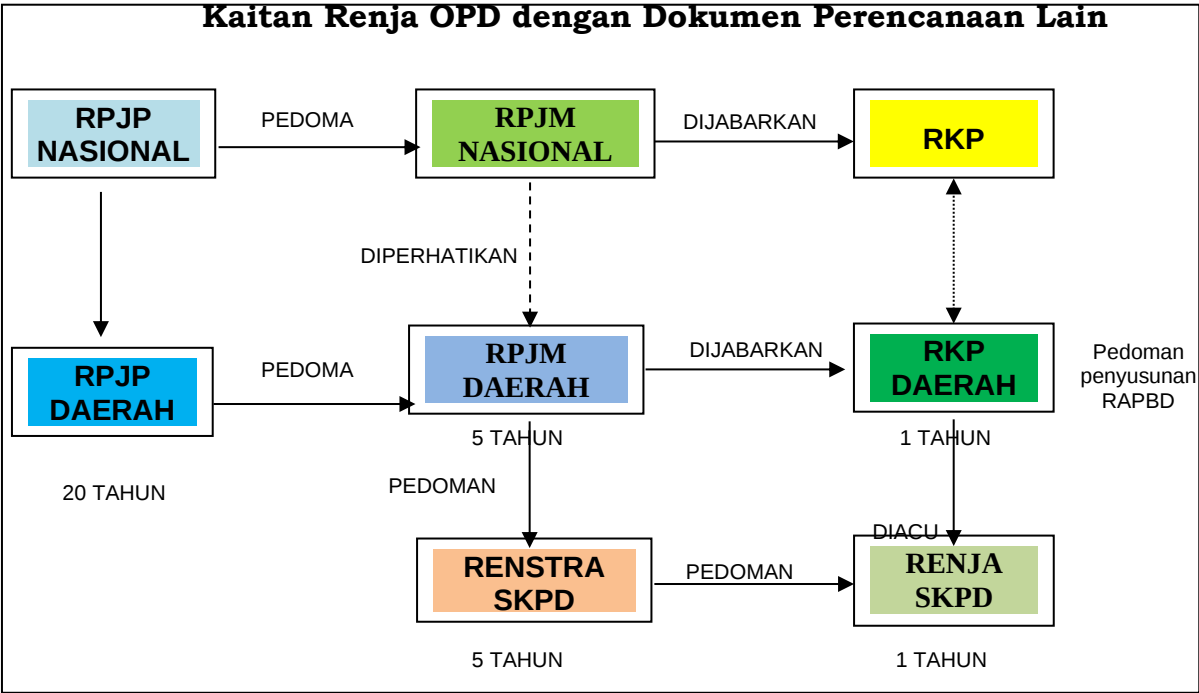
Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) adalah dokumen perencanaan tahunan pada level Perangkat Daerah dan disusun sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) yang berisi informasi tentang rencana program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh OPD dalam satu tahun anggaran yang dilengkapi dengan kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta memberikan gambaran mengenai tujuan, sasaran dan target kinerja dan bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan OPD sesuai tupoksinya

Dalam kaitannya untuk memenuhi maksud tersebut, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara juga berkewajiban menyusun Rencana Kerja Tahun 2024 sebagai bentuk komitmen Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup merupakan rencana kerja tahunan yang disusun dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Padang Lawas Utara dan berpedoman pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara.

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan dan mengacu pada RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya. Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah diarahkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan tetap memperhatikan usulan program dan kegiatan dari masyarakat melalui mekanisme musrenbang.

Keterkaitan antara Rencana Kerja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan renja Provinsi/ Kabupaten dapat digambarkan sebagai berikut :

Bagan 1.1



1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara tahun 2004 nomor 104 Tambahan Lembaran Negara nomor 4421) ;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2022 No. 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Akhir Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana 1213);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2013 Nomor 440, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 16);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara 2015-2035;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara;
13. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026;
14. SOTK Masing – Masing

1.3 Maksud dan Tujuan

a) Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup adalah untuk :

- a. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga tujuan dan sasaran yang ditetapkan dapat tercapai.
- b. Mempermudah koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan instansi terkait dan pengendalian kegiatan yang dilakukan melalui monitoring dan evaluasi baik secara internal maupun eksternal.

b) Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah:

1. Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks.
2. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik.
3. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan.
4. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan.
5. Memudahkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk menghadapi masa depan.
6. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.

7. Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan (*stakeholders*).

1.3 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Sistematika Penyusunan Rencana Kerja adalah :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup
- 2.4 Review terhadap Rancangan RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN LALU (2022)

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup

Capaian kinerja Organisasi yaitu pengukuran tingkat capaian kinerja kegiatan yang dimulai dengan menetapkan indikator kinerja kegiatan berdasarkan kelompok inputs, outputs, outcomes, benefits, dan impacts . Menentukan satuan setiap kelompok indikator, menetapkan rencana tingkat capaian (target), mengetahui realisasi indikator kegiatan, menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan persentasenya

Pada bab ini akan dipaparkan capaian target indikator-indikator kinerja tersebut tidak hanya dibandingkan dengan target indikator tahun bersangkutan juga akan dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya namun karena ini adalah tahun pertama periode Renstra 2024-2026 dimana ada perubahan indikator maka pemaparannya hanya pada capaian target tahun bersangkutan. Pada tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara mempunyai 8 Program dan 27 Kegiatan yang semuanya sudah direalisasikan. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu secara umum, capaian kinerja memenuhi target kinerja, meskipun ada sebagian indikator yang tidak memenuhi target namun sebaliknya ada juga beberapa indikator yang melebihi target.

Berikut penjelasan mengapa target program/kegiatan tersebut tidak tercapai, terpenuhi ataupun melebihi target, implikasi yang ditimbulkannya, serta kebijakan atau tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. Hasil pengukuran kinerja masing-masing sasaran akan diuraikan dalam pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel T-C 29

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup sampai dengan Tahun Berjalan

Kabupaten Padang Lawas Utara

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan (output)	Terget Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Terget Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun	
										Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2022 (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1						Urusan Wajib									
2	1	0				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									
2	1	0	2	0		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	1	0	2	0	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra	2 Dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 0	1 dok	50%
							Jumlah Dokumen Renja	5 Dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	3 Jenis	60%
2	1	0	2	0	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	5 Dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	3 dok	60%

			2	0 1	0 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	3 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	3 dok	100%
2	1 1	0 1	2	0 1	0 6	Koordinasi dan Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Lakip	5 Dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	3 dok	60%
2	1 1	0 1	2	0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
2	1 1	0 1	2	0 2	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah yang Menerima Gaji	576 Ob	132 ob	120 ob	120 ob	100%	120 ob	372 OB	65%
2	1 1	0 1	2	0 2	0 2	Penyediaan Administrasi Tugas ASN	jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	600 lapora n	132 lap	132 lap	132 lap	100%	132 lap	396 lap	66%
2	1 1	0 1	2	0 2	0 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	5 Dok	2 dok	1 dok	1	100%	1 dok	4 dok	80%
2	1 1	0 1	2	0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
2	1 1	0 1	2	0 5	0 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Papakaian dinas	544 Stell	272 Stell	272 Stell	- stell	0%	272 stell	544 Kali	100%
							Jumlah Pakaian Khusus	444 stell	0 stell	- stell	- stell	0%	- stell	- stell	0%
2	1 1	0 1	2	0 5	1 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah yg mengikuti Pendidikan Formal	5 orang	5 orang	0 orang	0 orang	0	0 orang	5 orang	100%

2	1 1	0 1	2	0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah								0							
2	1 1	0 1	2	0 6	0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah jenis komponen instalasi listri	30	jenis	12	jns	6	jns	6	jns	100%	6	jns	24	unit	80%
2	1 1	0 1	2	0 6	0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan Perlengkapan Kantor	6	unit	2	unit	2	unit	2	unit	100%	2	unit	6	unit	100%
							jumlah jenis alat kebersihan yang disediakan	30	Paket	12	paket	6	paket	6	paket	100%	6	paket	24	paket	80%
							jumlah jenis ATK yang disediakan	150	Paket	60	paket	30	paket	30	paket	100%	30	paket	120	paket	80%
2	1 1	0 1	2	0 6	0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang disediakan	2500	kotak	1000	kotak	500	ktk	500	ktk	100%	500	ktk	2000	kotak	80%
2	1 1	0 1	2	0 6	0 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yg disediakan	2747 0	lbr	##### #	lbr	5,49 4	lbr	5,49 4	lbr	100%	5,49 4	lbr	21,97 6	lbr	80%
							jumlah yang dicetak	36	jenis	12	jns	6	jns	6	jns	100%	6	jns	24	jns	67%

2	1 1	0 1	2	0 6	0 8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah dokumen Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yg disediakan	160 terbitan	64 terbitan	32 terbitan	32 terbitan	100%	32 terbitan	128 terbitan	80%
2	1 1	0 1	2	0 6	0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah laporan peyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	60 laporan	24 lpr	12 lpr	12 lpr	100%	12 lpr	48 lpr	80%
							jumlah perjalanan dinas dalam daerah	60 bulan	24 lpr	12 lpr	12 lpr	100%	12 lpr	48 bln	80%
2	1 1	0 1	2	0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah perjalanan dinas luar daerah	60 bulan	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	36 bln	60%
2	1 1	0 1	2	0 7	0 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan yg diadakan	2 unit	0	1 unit	-	0%	-	-	0%
2	1 1	0 1	2	0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah kendaraan dinas yang diadakan	2 unit	0 unit	- unit	- unit	0%	- unit	- Dok	0%
2	1 1	0 1	2	0 8	0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	450 lbr	150 lbr	150 lbr	150 lbr	100%	150 lbr	450 lbr	100%
2	1 1	0 1	2	0 8	0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	jumlah gedung kantor/sarana dan prasarana yang dibangun	60 paket	24 paket	12 paket	12 paket	100%	12 paket	48 Dok	80%

2	1 1	0 1	2	0 8	0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Materai yg diadakan	1380 ob	552 ob	276 ob	276 ob	100%	276 ob	1,104 ob	80%
2	1 1	0 1	2	0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		5 paket	1 paket	1 pakt	1 paket	100%	1 paket	3 paket	60%
			2	0 9	0 1	Pengadaan Kendaraan Dinas operasional	Jumlah kendaraan yg diadakan	1 unir	-	1 unit	1 unit	100%	- unit	1	100%
2	1 1	0 1	2	0 9	0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yg dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinan	110 unit	44 unit	22 unit	22 unit	100%	22 unit	88 unit	80%
2	1 1	0 1	2	0 9	0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yg dipelihara	110 unit	- unit	0 unit	- unit	0%	- unit	- unit	0%
2	1 1	0 1	2	0 9	0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Gedung kantor/sarana dan prasarana yang dibangun yg dipelihara</i>	1 unit					1 unit	1 unit	100%
2	1 1	0 2	# #	2		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	100%	2 unit	2 unit	100%
2	1 1	0 2	2	2	0 2	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup(RPPLH) Kab/Kota	Jumlah peralatan mesin lainnya		-			#DIV/0!	-	-	#DIV/0!

2	1 1	0 2	2	2	0 1	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	1 dok	-	1 dok	1 dok	100%	1 dok	1 dok	100%
2	1 1	0 2	2	2	0 2	PengendalianPelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah rumah gedung kantor yang dipelihara	1 dok	-	1 dok	1 dok	100%	1 dok	1 dok	100%
2	1 1	0 2	2	0 2		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis(KLHS)Kabupaten/ Kota									
2	1 1	0 2	2	0 2	0 1	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen	1 Dok	1 Dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	1 dok	100%
2	1 1	0 2	2	0 2	0 2	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen RPJPD/RPJMD	1 Dok	0 dok	1 dok	1 dok	100%	- dok	1 dok	100%
2	1 1	0 2	2	0 2	0 3	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang berpotensi menimbulkan dampak /resiko lingkungan Hidup									
2	1 1	0 3				PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP									
2	1 1	0 3	2	0 1		Pencegahan Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen								

2	1 1	0 3	2	0 1	0 1	Koordinasi,Sinkronisasi,dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup di laksanakan terhadap media tanah air,udara dan laut	Jumlah Dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah,air,udara dan laut	4 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	3 dok	75%
2	1 1	0 3	2	0 1	0 2	Koordinasi,Sinkronisasi dan Pelaksaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca,Mitigasi dan adaptasi peerubahan Iklim	Jumlah Dokumen pengendalian emisi gas rumah kaca,mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	3 dok	0 dok	- dok	- dok		- dok	dok	0%
2	1 1	0 3	2	0 1	0 3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota							-	-	
2	1 1	0 3	2	0 2		Penanggulangan Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota								-	
2	1 1	0 3	2	0 2	0 2	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan hidup pada masyarakat	jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	4 lapora n	2 lpr	1 lpr	1 lpr	100%	1 lpr	4 titik	100%
2	1 1	0 3	2	0 2	0 2	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah masyarakat yg mengikuti sosialisasi	2160 org	840 org	-	-		-	-	0%

2	1 1	0 3	2	0 2	0 3	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	jumlah sumber pencemaran	4 laporan	2 lpr	1 lpr	1 lpr	100%	1 lpr	4 titik	100%
2	1 1	0 3	2	0 3		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup/Kota									#DIV/0!
2	1 1	0 3	2	0 3	0 1	Koordinasi dan sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah papan informasi	0 unit	- %	- Dok	- Dok	#DIV/0!	- Dok	- Dok	#DIV/0!
2	1 1	0 3	2	0 3	0 2	Koordinasi dan sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	jumlah yg menerima honor	30 oh	-	-	-		-	-	0%
2	1 1	0 3	2	0 3	0 3	koordinasi, sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi									
2	1 1	0 4				PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Jumlah Bibit	1200 bibit			- Kali		- Kali	- Kali	0%
2	1 1	0 4	2	0 1		Pengelolaan keanekaragaman Hayati kabupaten/kota	Jumlah yg menrima honor	300 oh	-	-	-		-	-	0%
2	1 1	0 4	2	0 1	0 1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati								-	
2	1 1	0 4	2	0 1	0 2	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan									
2	1 1	0 4	2	0 1	0 3	Pengelolaan Kebun Raya									

2	1 1	0 4	2	0 1	0 4	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	3 Ha	2 Ha	1 Ha	1 pgs	100%	1 Ha	3 pgs	100%
2	1 1	0 4	2	0 1	0 6	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati									#DIV/0!
2	1 1	0 4	2	0 1	0 7	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati									#DIV/0!
2	1 1	0 5				PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	persentase peningkatan jumlah masyarakat/lembaga yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan								#DIV/0!
2	1 1	0 5	2	0 1		Penyimpanan Sementara Limbah B3									#DIV/0!
2	1 1	0 5	2	0 1	0 1	Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik									#DIV/0!

2	1 1	0 5	2	0 2	0 2	Verifikasi Lapangan Untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Sampel	20 kali	8 kali	4 kali	4 kali	100%	4 kali	16 kali	80%
2	1 1	0 5	2	0 2		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana dan sarana pemeliharaan	30 unit	0	0	0		0	0	0%
2	1 1	0 5	2	0 2	0 1	Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	jumlah yg menerima honor	648 ob	0	0	0		0	0	0%
2	1 1	0 5	2	0 2	0 2	Koordinasi dan sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan Pemanfaatan Pengelolaan dan/atau Penimbunan	Jumlah yg mengikuti penyuluhan	300 orang	0	0	0		0	0	0%
2	1 1	0 6				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAHAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)									#DIV/0!
2	1 1	0 6	2	0 1		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	persentase kualitas mutu kualitas udara								#DIV/0!

2	1 1	0 6	2	0 1	0 1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	terlaksananya uji laboratorium limbah	1 dok	1 dok	0	0	#DIV/0!	1 dok	1 dok	100%
2	1 1	0 6	2	0 2	0 2	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Terlaksananya uji laboratorium limbah								#DIV/0!
2	1 1	0 6	2	0 1	0 3	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya uji laboratorium limbah								#DIV/0!
2	1 1	0 6	2	0 1	0 4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH									#DIV/0!
2	1 1	0 7				PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang SDA								#DIV/0!
2	1 1	0 7	2	0 1		Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen AMDAL	1 Dok	0 dok	0 dok	0 dok	0	0 dok	0 dok	0%

2	11	07	2	01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait									#DIV/0!
2	11	07	2	02		Penigkatan Kapasitas MHA, dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen DIKPLHD	3 Dok	1 dok	0 dok	0 dok	0	0 dok	1 dok	33%
2	11	07	2	02	01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Tersusunnya status lingkungan(SLHD)								#DIV/0!
2	11	08				PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN,PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT									#DIV/0!
2	11	08	2	01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									#DIV/0!

2	1 1	0 8	2	0 1	0 1	Penigkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan									#DIV/0!
2	1 1	0 8	2	0 1	0 2	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah bibit	4 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	2 dok	4 dok	100%
2	1 1	0 8	2	0 1	0 3	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	laporan koordinasi perencanaan sosial budaya								#DIV/0!
2	1 1	0 9				PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Pelayanan informasi status mutu udara ambient								#DIV/0!
2	1 1	0 9	2	0 1		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									#DIV/0!
2	1 1	0 9	2	0 1	0 1	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha / Dunia Pendidikan/ Fllantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup									#DIV/0!
2	1 1	10				PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP									#DIV/0!
2	1 1	10	2	0 1		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan kemah Hijau	4 kali	1 kali	0 kali	0 kali	0	0 kali	1 kali	25%

2	1 1	10	2	0 1	0 1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	rangkaian hari lingkungan hidup	3 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100%	1 kali	3 kali	100%
2	1 1	10	2	0 1	0 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah yg mengikuti penyuluhan tentang Dokumen	300 orang	0 org	0 org	0 org	0%	0 org	0 org	0%
2	1 1	1 1				PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN									#DIV/0!
2	1 1	1 1	2	0 1		Pengelolaan Sampah									#DIV/0!
2	1 1	1 1	2	0 1	0 1	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota									#DIV/0!
2	1 1	1 1	2	0 1	0 2	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali									#DIV/0!
2	1 1	1 1	2	0 1	0 3	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/ TPST/ SPA/ Kabupaten/Kota									#DIV/0!
2	1 1	1 1	2	0 1	0 4	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kelompok	2 klmp	1 klmp	1 klmp	1 klmp	100%	1 lmpk	2 klmp	100%
2	1 1	1 1	2	0 1	0 5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen	5 Dok	2 Dok	1 dok	1 Dok	100%	1 Dok	4 dok	80%

2	1 1	1 1	2	0 1	0 6	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan									#DIV/0!
2	1 1	1 1	2	0 1	0 7	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/ TPS/ SPA	Jumlah Sarana dan Prasarana	1750 unit	750 unit	350 unit	350 unit	100%	350 unit	1450 unit	83%
2	1 1	1 1	2	0 3		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah Yang Diselenggrakan Oleh Pihak Swasta									#DIV/0!
2	1 1	1 1	2	0 3	0 3	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah									#DIV/0!

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Indikator capaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Padang Lawas Utara belum memiliki Standar Pelayanan Minimal, sehingga untuk menganalisis dan mengukur kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan yang dilaksanakan digunakan Indikator Kinerja yang ada dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024-2026 yang dikembangkan menjadi Indikator Kinerja Kunci, sebagaimana telah disusun oleh bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Akan Tetapi dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala yang menjadi evaluasi untuk tahun berikutnya agar lebih baik. Adapun beberapa permasalahan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, antara lain :

1. Masih kurangnya koordinasi dan kerjasama lintas sektoral dan lintas program;
2. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia pada Dinas Perhubungan;
3. Kurangnya tenaga-tenaga teknis dibidang Lingkungan Hidup;
4. Rendahnya peran serta masyarakat dibidang Lingkungan ;
5. Belum sepenuhnya program/kegiatan yang dilaksanakan mengacu kepada pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan;

Adapun pencapaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel T-C 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Padang Lawas Utara

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Renstra SKPD tahun ke			Realisasi Capaian	Proyeksi			Catatan Analis
				tahun 2021	tahun 2022	tahun 2023		than 2021	tahun 2022	tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/ Kota			44 %	46 %	47 %	72 %	60 %	72% %	72 %`	
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kabupaten/kota			42 %	42 %	44 %	13,60 %	13,50 %	13,60 %	13.6 %	
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/ Kota			60 %	62 %	65 %	62 %	60 %	62% %	65 %	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra SKPD

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan SKPD, kajian hasil pelaksanaan SKPD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra SKPD, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi tersebut.

Isu strategis tersebut adalah :

Masih Rendahnya Kualitas Lingkungan Hidup baik air, udara, maupun lahan akibat bekurangnya tutupan lahan

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kotasebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah merupakan *Unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar*

Sebagai SKPD yang merupakan Unsur pelaksana urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi yang meliputi:

- a. menyusun rencana dan program kerja serta menyusun kebijakan teknis bidang pengendalian dan pencegahan dampak lingkungan;
- b. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat yang berhubungan dengan pengendalian dampak lingkungan;
- c. melaksanakan kebijakan teknis pengendalian dan pencegahan dampak lingkungan;

- d. memberikan rekomendasi terhadap semua izin yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara yang menyangkut terhadap bidang lingkungan hidup;
- e. melakukan koordinasi dan menyampaikan pelaporan status lingkungan hidup;
- f. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas:
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya

Dalam menjawab tantangan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara banyak menghadapi masalah dan hambatan seperti :

- a. Belum terbangunnya infrastruktur TPA sehingga mempengaruhi penanganan dan pengelolaan persampahan
- b. Masih kurang pedulinya masyarakat terhadap lingkungan hidup.
- c. Masih banyaknya pelaku kegiatan/usaha yang belum mentaati peraturan lingkungan hidup secara baik.
- d. Upaya pengelolaan lingkungan hidup semakin berat dan kompleks, berbagai upaya yang telah dilakukan masih terasa belum sepenuhnya menunjukkan keberhasilan yang signifikan. tingkat pencemaran dan kerusakan yang telah terjadi belum sebanding dengan tingkat keberhasilan kita dalam melakukan usaha perbaikan lingkungan
- e. Banyaknya perubahan terhadap lingkungan hidup akibat aktivitas masyarakat yang terus meningkat tanpa mempedulikan keadaan lingkungan, misalnya perubahan penggunaan lahan dari sawah menjadi permukiman, dan hutan dirambah menjadi lahan kelapa sawit

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi ini tentu berdampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah antara lain :

- a. Rendahnya tingkat pengelolaan dan penanganan sampah

- b. Tingginya tingkat pencemaran lingkungan baik air maupun udara

Sedangkan untuk peluang dan tantangan dalam meningkatkan pelayanan yaitu :

Peluang (Opportunities)

Peluang – peluang yang dapat dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Adanya manajemen sumber daya manusia;
- b. Berkembangnya sarana komunikasi global, sehingga memungkinkan penyampaian informasi yang cepat dan tepat

Ancaman/Tantangan (Threat)

Munculnya peluang di berbagai sektor akan menjadi tantangan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara.

Tantangan yang harus dijawab adalah sebagai berikut :

- a. Penurunan disiplin kerja
- b. Penurunan kinerja
- c. Kesulitan dalam pengawasan pegawai

Berangkat dari isu-isu Penting tersebut, maka langkah penentu yang akan dilaksanakan antara lain :

- a. Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan.
- b. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
- c. Perlindungan dan konservasi sumber daya alam.
- d. Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- e. Peningkatan pengendalian polusi

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Renja RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah penjabaran dari RPJMD Kabupaten Padang lawas Utara. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra OPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh OPD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap OPD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Merumuskan kebutuhan program dan kegiatan hasil review terhadap rancangan awal RKPD yang lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program/kegiatan; dan dapat dilihat dari Tabel berikut ini :

TABEL T-C 31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Padang Lawas Utara

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
					(Rp.)					(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kap.Paluta	persentase pemenuhan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	33,05 %	3,207,777,011	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kap.Paluta	persentase pemenuhan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	33.05 %	3,207,777,011	
1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kap.Paluta	jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	4 Sub Kegiatan	81,938,000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Paluta	jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	4 Sub Kegiatan	81,938,000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kap.Paluta	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dok	20,484,500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kap.Paluta	jumlah dokumen renja	2 dok	20,484,500	
		Kap.Paluta	jumlah dokumen Renstra	1 dok	-		Kab.Paluta	jumlah dokumen Renstra	1 dok	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kap.Paluta	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dok	20,484,500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kap.Paluta	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dok	20,484,500	

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kap.Paluta	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dok	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kap.Paluta	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dok	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kap.Paluta	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	40,969,000	Koordinasi dan Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Paluta	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dok	40,969,000	
1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kap.Paluta	jumlah kegiatan administrasi keuangan daerah	3 Sub Kegiatan	1,946,047,711	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kap.Paluta	jumlah laporan keuangan	3 Sub Kegiatan	1,946,047,711	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kap.Paluta	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan AS	252 Ob	1,743,283,211	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Paluta	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan AS	12 bulan	1,743,283,211	
	Penyediaan Administrasi Tugas ASN	Kap.Paluta	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	144 OB	182,280,000	Penyediaan Administrasi Tugas ASN	Kap.Paluta	honor pelaksana kegiatan	144 OB	182,280,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kap.Paluta	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 lap	20,484,500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab.Paluta	jumlah laporan keuangan	1 lap	20,484,500	
1.03	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kap.Paluta	jumlah kegiatan administrasi keuangan daerah	2 Sub Kegiatan	80,963,200	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kap.Paluta	jumlah kegiatan administrasi keuangan daerah	2 Sub Kegiatan	80,963,200	

	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kap.Paluta	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	242	stell	36,403,200	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab.Paluta	jumlah pakaian dinas yang diadakan	20	stell	36,403,200	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kap.Paluta	jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	10	org	44,560,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kap.Paluta	jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	2	org	44,560,000	
1.04	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kap.Paluta	jumlah kegiatan administrasi umum perangkat daerah	6	Sub Kegiatan	277,975,600	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab.Paluta	jumlah kegiatan administrasi umum perangkat daerah	6	Sub Kegiatan	277,975,600	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kap.Paluta	jumlah jenis komponen instalasi listrik	6	jenis		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kap.Paluta	jumlah jenis komponen instalasi listrik	11	jenis		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kap.Paluta	jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	14	jenis	5,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Paluta	jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	4	unit	5,000,000	
		Kap.Paluta	jumlah jenis alat kebersihan yang disediakan	12	jenis	9,220,000		Kap.Paluta	jumlah jenis alat kebersihan yang disediakan	11	jenis	9,220,000	
		Kap.Paluta	jumlah jenis ATK yang disediakan	42	jenis	38,292,000		Kab.Paluta	jumlah jenis ATK yang disediakan	42	jenis	38,292,000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kap.Paluta	jumlah makan minum tamu dan rapat yang disediakan	500	kotak	23,900,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kap.Paluta	jumlah makan minum tamu dan rapat yang disediakan	500	kotak	23,900,000	

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kap.Paluta	jumlah yang dicetak	9 jenis	6,179,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab.Paluta	jumlah yang dicetak	12 jenis	6,179,000	
		Kap.Paluta	jumlah barang yang digandakan	3 jenis	6,059,600		Kap.Paluta	jumlah barang yang digandakan	3 jenis	6,059,600	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kap.Paluta	jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	32 jenis terbitan	40,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab.Paluta	jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	32 jenis terbitan	40,000,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kap.Paluta	jumlah perjalanan dinas dalam daerah	40 kali	111,825,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kap.Paluta	jumlah perjalanan dinas dalam daerah	40 kali	111,825,000	
		Kap.Paluta	jumlah perjalanan dinas luar daerah	75 bulan	37,500,000		Kab.Paluta	jumlah perjalanan dinas luar daerah	75 kali	37,500,000	
1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kap.Paluta	jumlah kendaraan dinas yang diadakan	1 Sub Kegiatan		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kap.Paluta	jumlah kendaraan dinas yang diadakan	6 Sub Kegiatan		
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kap.Paluta	jumlah kendaraan dinas yang diadakan	1 unit	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab.Paluta	jumlah kendaraan dinas yang diadakan	17 unit	-	

1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kap.Paluta	jumlah materai yang disediakan	3	Sub Kegiatan	408,434,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kap.Paluta	jumlah materai yang disediakan	3	Sub Kegiatan	408,434,000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kap.Paluta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200	laporan	2,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab.Paluta	jumlah materai yang disediakan	300	lembar	2,000,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	Kap.Paluta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12500	kwh	30,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	Kap.Paluta	jumlah pemakaian tenaga listrik	####	kwh	30,000,000	
		Kap.Paluta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, yang Disediakan	200	mbps	15,300,000		Kab.Paluta	jumlah pemakaian internet	200	0	15,300,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kap.Paluta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72	OB	216,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kap.Paluta	84	48	OB	216,000,000	
		Kap.Paluta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	528	OB	145,134,000		Kab.Paluta	jumlah tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	528	OB	145,134,000	
1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kap.Paluta	jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	3	Sub Kegiatan	412,418,500	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Padang Lawas Utara	jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	3	Sub Kegiatan	412,418,500	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kap.Paluta	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara undefi	22	unit	412,418,500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kap.Paluta	jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	22	unit	412,418,500	

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kap.Paluta	jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	0 unit	-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Paluta	jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	22 unit	-	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kap.Paluta	jumlah rumah gedung kantor yang dipelihara	0 unit	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kap.Paluta	jumlah rumah gedung kantor yang dipelihara	1 unit	-	
02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Kap.Paluta	terpantaunya kualitas lingkungan	33,20 %	-	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Kab.Paluta	terpantaunya kualitas lingkungan	33,20 %	-	
2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup(RPPLH) Kab/Kota	Kap.Paluta	Jumlah Dokumen Lingkungan	2 Sub Kegiatan	-	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup(RPPLH) Kab/Kota	Kap.Paluta	Jumlah Dokumen Lingkungan	2 Sub Kegiatan	-	
	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Kap.Paluta	jumlah dokumen lingkungan	0 dok	-	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Kab.Paluta	tersusunnya dokumen DDTLH	1 dok	-	
	PengendalianPelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Kap.Paluta	Jumlah Dokumen			PengendalianPelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Kap.Paluta		1 dok		
2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis(KLHS)Kabupaten/Kota	Kap.Paluta	Jumlah Dokumen KLHS	3 Sub Kegiatan	-	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis(KLHS)Kabupaten/Kota	Kab.Paluta	Jumlah Dokumen KLHS	3 Sub Kegiatan	-	
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Kap.Paluta	Jumlah Dokumen	1 dok	-	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Kap.Paluta	Jumlah Dokumen		-	
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Kap.Paluta	Jumlah Dokumen	1 dok	-	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Kab.Paluta	Jumlah Dokumen	1 Dok	-	
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang berpotensi menimbulkan dampak /resiko lingkungan Hidup	Kap.Paluta				Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang berpotensi menimbulkan dampak /resiko lingkungan Hidup	Kap.Paluta				

03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Kap.Paluta	persentasepeningkatan mutu kualitas air	25.03 %	69,278,000	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Kab.Paluta	persentasepeningkatan mutu kualitas air	25 %	69,278,000	
3.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kap.Paluta	Jumlah Pemantauan	3 Sub Kegiatan	69,278,000	Pencegahan Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kap.Paluta	Jumlah Pemantauan	3 Sub Kegiatan	69,278,000	
	Koordinasi,Sinkronisasi,dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup di laksanakan terhadap media tanah air,udara dan laut	Kap.Paluta	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Lau	17 Dok	69,278,000	Koordinasi,Sinkronisasi,dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup di laksanakan terhadap media tanah air,udara dan laut	Kab.Paluta	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Lau	30 Dok	69,278,000	
	Koordinasi,Sinkronisasi dan Pelaksaaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca,Mitigasi dan adaptasi peerubahan Iklim	Kap.Paluta	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	0 0		Koordinasi,Sinkronisasi dan Pelaksaaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca,Mitigasi dan adaptasi peerubahan Iklim	Kap.Paluta	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	4 Dok		
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kap.Paluta	Jumlah perusahaan yg mengikuti bimbingan	480 org		Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab.Paluta	Jumlah perusahaan yg mengikuti bimbingan			
3.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kap.Paluta	terpantaunya kualitas lingkungan air,uadara dan tanah	3 Sub Kegiatan	-	Penanggulangan Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kap.Paluta	terpantaunya kualitas lingkungan air,uadara dan tanah	3 Sub Kegiatan	-	
	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan hidup pada masyarakat	Kap.Paluta	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan			Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan hidup pada masyarakat	Kab.Paluta	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	3 LAP		

	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kap.Paluta				Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kap.Paluta				
	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kap.Paluta	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentika			Jumlah sumber pencemar/atau kerusakan lingkungan hidup	Kab.Paluta	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentika	20 titik		
3.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup/Kota	Kap.Paluta				Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup/Kota	Kap.Paluta				
	Koordinasi dan sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Kap.Paluta				Koordinasi dan sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Kab.Paluta				
	Koordinasi dan sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Kap.Paluta				Koordinasi dan sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Kab.Paluta				
	koordinasi, sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	Kap.Paluta				koordinasi, sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	Kap.Paluta	Jumlah Perusahaan			
04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Kap.Paluta	persentase peningkatan jumlah masyarakat/lembaga yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan		-	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Kab.Paluta	persentase peningkatan jumlah masyarakat/lembaga yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan		-	
4.01	Pengelolaan keanekaragaman Hayati kabupaten/kota	Kap.Paluta			-	Pengelolaan keanekaragaman Hayati kabupaten/kota	Kap.Paluta			-	
	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kap.Paluta				Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kab.Paluta				

	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Kap.Paluta				Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Kap.Paluta				
	Pengelolaan Kebun Raya	Kap.Paluta				Pengelolaan Kebun Raya	Kab.Paluta				
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kap.Paluta	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1,5 ha		Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kap.Paluta	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1,5 Ha		
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kap.Paluta	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati			Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kap.Paluta	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	150 org		
	Pengelolaan Sarana dan Prasana Keanekaragaman Hayati	Kap.Paluta			-	Pengelolaan Sarana dan Prasana Keanekaragaman Hayati				-	
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Kap.Paluta	persentase kualitas mutu kualitas udara	70 %	25,750,000	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Kap.Paluta	persentase kualitas mutu kualitas udara	70 %	25,750,000	
05	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kap.Paluta	terlaksananya uji laboratorium limbah		25,750,000	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kap.Paluta	terlaksananya uji laboratorium limbah		25,750,000	

5.01	Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kap.Paluta	Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4 Dok	25,750,000	Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab.Paluta	Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4 Dok	25,750,000	
	Verifikasi Lapangan Untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kap.Paluta	Jumlah Uji laboratorium	1 dok	-	Verifikasi Lapangan Untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kap.Paluta	Jumlah Uji laboratorium		-	
	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kap.Paluta			-	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Paluta			-	
06	Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kap.Paluta	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan			Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kap.Paluta	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	1 lap		
6.01	Koordinasi dan sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan Pemanfaatan Pengelolaan dan/atau Penimbunan	Kap.Paluta				Koordinasi dan sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan Pemanfaatan Pengelolaan dan/atau Penimbunan	Kab.Paluta				

	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAHAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Kap.Paluta				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAHAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Kap.Paluta				
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kap.Paluta				Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kap.Paluta	Jumlah dokumen DIKPLHD			
	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kap.Paluta	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan			Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kap.Paluta	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	1 lap		
	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Kap.Paluta	Jumlah yg dilatih			Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Kab.Paluta	Jumlah perusahaan yg mengikuti sosialisasi			
08	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kap.Paluta	Jumlah perusahaan yg mengikuti sosialisasi			Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kap.Paluta				

8.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Kab. Palut a				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Kab. Palut a				
	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Kabupaten Padang Lawas Utara				PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Kabupaten Padang Lawas Utara				
	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Kab. Padang Lawas Utara				Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Kab. Padang Lawas Utara				
	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait	Kab. Palut a				Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait	Kab. Palut a				

09	Penigkatan Kapasitas MHA, dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Kabupate n Padang Lawas Utara	laporan koordinasi perencanaan sosial budaya			Penigkatan Kapasitas MHA, dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Kabupate n Padang Lawas Utara				
9.01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Kap.Palut a				Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Kap.Palut a				
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Kap.Palut a		80 %	-	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Kab.Palut a		80 %	-	
10	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kap.Palut a			-	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kap.Palut a			-	

10.0 1	Penigkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan	Kap.Palut a	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	1	lembaga		Penigkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan	Kab.Palut a	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	1	lembaga	
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kap.Palut a	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan			-	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kap.Palut a	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	4	Dok	-
	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Kap.Palut a					Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Kab.Palut a				
11	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Kap.Palut a				-	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Kap.Palut a				-
11.0 1	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kap.Palut a				-	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Palut a				-

	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha / Dunia Pendidikan/ Fllantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kap.Paluta		1 dok	-	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha / Dunia Pendidikan/ Fllantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kap.Paluta			-	
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Kap.Paluta			-	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Kab.Paluta			-	
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Kap.Paluta			-	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Kabupaten Padang Lawas Utara			-	
	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Kap.Paluta				Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Kap.Paluta	Jumlah Dokumen			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Kap.Paluta				Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Kab.Paluta				

	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Kap.Paluta	Persentase penanganan sampah	70 %	1,510,826,000	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Kap.Paluta	Persentase penanganan sampah	70 %	1,510,826,000	
	Pengelolaan Sampah	Kap.Paluta		161 unit	1,510,826,000	Pengelolaan Sampah	Kap.Paluta		161 unit	1,510,826,000	
11.0 2	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Kap.Paluta	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	2 kelompok	-	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Kap.Paluta	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	2 klmp	-	
	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Kap.Paluta				Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Kap.Paluta				
11.0 3	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/ TPST/ SPA/ Kabupaten/Kota	Kap.Paluta				Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/ TPST/ SPA/ Kabupaten/Kota	Kap.Paluta				
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	Kap.Paluta	Jumlah orang/masyarakat yg mengikuti pelatihan persampahan			Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	Kab.Paluta	Jumlah orang/masyarakat yg mengikuti pelatihan persampahan	2 Klmp		

	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Kap.Paluta	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrad	1 Dok	1,470,826,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Kap.Paluta	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrad	1 dok	1,470,826,000	
	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Kabupaten Padang Lawas Utara		1 Dok		Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Kab.Paluta				
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/ TPS/ SPA	Kap.Paluta	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	420 Unit	40,000,000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/ TPS/ SPA	Kab.Paluta	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	420 unit	40,000,000	

	Penerbitan Izin Pendaaurulangan Sampah/ Pengelolaan Sampah, Pengakutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah Yang di selenggarakan Oleh Swasta	Kap.Paluta				Penerbitan Izin Pendaaurulangan Sampah/ Pengelolaan Sampah, Pengakutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah Yang di selenggarakan Oleh Swasta	Kab.Paluta				
	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kap.Paluta				Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab.Paluta				
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah Yang Diselenggarakan Oleh Pihak Swasta	Kap.Paluta			0	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah Yang Diselenggarakan Oleh Pihak Swasta	Kab.Paluta			0	
	Penyusunan dan Pelaksanaan Peniaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Kap.Paluta				Penyusunan dan Pelaksanaan Peniaian Kinerja Pengelolaan Sampah					
	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Kap.Paluta	jumlah dokumen	1 Dok		Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Kap.Paluta	jumlah dokumen			
			Total		4,813,631,011					4,813,631,011	

2.5 Penelaahan Terhadap Usulan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan yang ada pada Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2024 merupakan hasil dari Musrenbangcam tahun 2023. Akan tetapi hasil Musrenbangcam tidak semua dimasukkan dalam program/kegiatan Dinas Lingkungan Hidup, hal tersebut terbentur dengan paguanggaran yang ada sehingga tidak memungkinkan untuk mengcover semua hasil Musrenbangcam.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 3 (2024 – 2026) memiliki tujuan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan agenda pembangunan yaitu :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Merujuk kepada RPJMN tahun 2023 – 2026, arah kebijakan dalam hal urusan lingkungan hidup adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan sasaran meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada poin 75.0 – 78.0 di tahun 2026.

Untuk mencapai target tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menyiapkan strategi/kegiatan prioritas, yaitu :

1. Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
2. Penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
2. Pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
3. Penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.

3.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Renja Dinas Lingkungan Hidup

Kebijakan Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

a. Tujuan

Tujuan yang ditetapkan merupakan kondisi ideal yang ingin dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara dalam rangka menyelesaikan isu strategis yang telah disusun dengan mempunyai batas waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) Tahun kedepan atau kata lain yang mempunyai orientasi masa depan.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara mempunyai tujuan :

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

b. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran yang lebih rinci dari tujuan yang telah ditetapkan yang dapat dimiliki atau diatur dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan dan bulanan dalam periode 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (Tiga) tahun yang dilakukan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan berorientasi pada hasil yang menantang namun dapat direalisasikan/ dicapai.

Adapun Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kab. Padang Lawas Utara :

1. Meningkatkan Kualitas Kinerja dan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup

c. Strategi

1. Meningkatkan Nilai AKIP Dinas Lingkungan Hidup
2. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat

3. Peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup .
4. Peningkatan ketaatan masyarakat terhadap batas baku mutu emisi kendaraan bermotor dan pelaku usaha/kegiatan terhadap cerobong emisi

d. Kebijakan

1. Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
2. Pelaksanaan Pengelolaan Sampah.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup.
4. Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran dan /atau Kerusakan lingkungan Hidup
5. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup.
6. Meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha dan kegiatan dalam mentaati baku mutu emis

Berikut tabel Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Renja Dinas Lingkungan Hidup

TABEL 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatkan Kualitas Kinerja dan Pelayanan di Dinas Lingkungan Hidup	Nilai AKIP	Meningkatkan Nilai AKIP Dinas Lingkungan Hidup	Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		Indesk Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat	Pelaksanaan Pengelolaan Sampah
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase titik pantau Peningkatan Tutupan Lahan	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup	Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup
		Persentase Titik pantau Peningkatan Mutu Kualitas Udara	Peningkatan ketaatan masyarakat terhadap batas baku mutu emisi kendaraan bermotor dan pelaku usaha/kegiatan terhadap cerobong emisi	Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran dan /atau Kerusakan lingkungan Hidup
				Meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha dan kegiatan dalam mentaati baku mutu emisi

3.3 Program dan Kegiatan

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara telah menyusun rencana Program dan Kegiatan melalui Rancangan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023.

Bedasarkan alasan tersebut diatas maka Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup yang direncanakan melalui Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2022 dapat dilihat sebagai berikut :

TABEL T-C 33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025

KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

Unit Organisasi : 2.11 Dinas Lingkungan Hidup

Sub Unit Organisasi : 2.11 Dinas Lingkungan Hidup

KODE						URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2024			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
									TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	11	01				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	persentase pemenuhan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Kab.Paluta	33,05 %	3,207,777,011	DAU		33,05 %	3,505,798,292
2	11	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen renja	Kab.Paluta	4 Sub Kegiatan	81,938,000	DAU		4 Sub Kegiatan	81,000,000
2	11	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen renja	Kab.Paluta	1 dok	20,484,500	DAU		1 dok	33,000,000

							jumlah dokumen Renstra	Kab.Paluta	1 dok	-	DAU		1 dok	-
2	11	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA	Kab.Paluta	1 dok	20,484,500	DAU		1 dok	16,500,000
2	11	01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA	Kab.Paluta	1 dok	-	DAU		1 dok	-
2	11	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen LAKIP Bapelitbang	Kab.Paluta	1 dok	40,969,000	DAU		1 dok	31,500,000
2	11	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah laporan keuangan	Kab.Paluta	3 Sub Kegiatan	1,946,047,711	DAU		3 Sub Kegiatan	1,963,534,318
2	11	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kab.Paluta	12 bulan	1,743,283,211	DAU		12 bulan	1,841,002,318
2	11	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Tugas ASN	honor pelaksana kegiatan	Kab.Paluta	144 OB	182,280,000	DAU		144 OB	106,032,000
2	11	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah laporan keuangan	Kab.Paluta	1 lap	20,484,500	DAU		1 lap	16,500,000

2	11	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	Kab.Paluta	2	Sub Kegiatan	80,963,200	DAU		2	Sub Kegiatan	150,000,000
2	11	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pakaian dinas yang diadakan	Kab.Paluta	20	stell	36,403,200	DAU		60	stell	50,000,000
2	11	01	2	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	Kab.Paluta	2	org	44,560,000	DAU		10	org	100,000,000
2	11	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah jenis komponen instalasi Listrik	Kab.Paluta	6	Sub Kegiatan	277,975,600	DAU		6	Sub Kegiatan	455,471,250
2	11	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah jenis komponen instalasi Listrik	Kab.Paluta	11	jenis		DAU		9	jenis	17,926,600
2	11	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	Kab.Paluta	14	jenis	5,000,000	DAU		14	jenis	59,066,600
							jumlah jenis alat kebersihan yang disediakan	Kab.Paluta	12	jenis	9,220,000	DAU		15	jenis	21,815,700
							jumlah jenis ATK yang disediakan	Kab.Paluta	42	jenis	38,292,000	DAU		42	jenis	57,167,450

2	11	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah makan minum tamu dan rapat yang disediakan	Kab.Paluta	500 kotak	23,900,000	2.2E+07		10,000 kotak	25,095,000
2	11	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah yang dicetak	Kab.Paluta	12 jenis	6,179,000	DAU		12 jenis	10,050,050
							jumlah barang yang digandakan	Kab.Paluta	3 jenis	6,059,600	DAU		3 jenis	11,799,850
2	11	01	2	06	08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab.Paluta	32 terbitan	40,000,000	4.5E+07		30 terbitan	40,000,000
2	11	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah perjalanan dinas dalam daerah	Kab.Paluta	40 kali	111,825,000	DAU		12 bulan	70,000,000
							jumlah perjalanan dinas luar daerah	Kab.Paluta	75 kali	37,500,000	1.4E+08		12 bulan	142,550,000
2	11	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah kendaraan dinas yang diadakan	Kab.Paluta	1 Sub Kegiatan		DAU		1 Sub kegiatan	125,000,000
2	11	01	2	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas yang diadakan	Kab.Paluta	1 unit	-	DAU		1 unit	125,000,000

2	11	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah materai yang disediakan	Kab.Paluta	3	Sub Kegiatan	408,434,000	DAU		300	lembar	321,900,000
2	11	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah materai yang disediakan	Kab.Paluta	300	lbr	2,000,000	DAU		3	Sub Kegiatan	5,000,000
2	11	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	jumlah pemakaian tenaga Listrik	Kab.Paluta	33.104	kwh	30,000,000	DAU		33.1	kwh	30,000,000
							jumlah pemakaian internet	Kab.Paluta	200	mbps	15,300,000	DAU		200	mbps	15,300,000
2	11	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah tenaga kebersihan	Kab.Paluta	84	OB	216,000,000	DAU		84	OB	126,466,000
							jumlah tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Kab.Paluta	528	OB	145,134,000	DAU		528	OB	145,134,000
2	11	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Kab.Paluta	3	Sub Kegiatan	412,418,500	DAU		3	Sub Kegiatan	408,892,724
2	11	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Kab.Paluta	22	unit	412,418,500	DAU		22	unit	298,892,724

2	11	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Kab.Paluta	70 unit	-	DAU		35,000,000
2	11	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah rumah gedung kantor yang dipelihara	Kab.Paluta	1 unit	-	DAU		75,000,000
2	11	02	2	2		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	terpantaunya kualitas lingkungan	Kab.Paluta	33,20 %	-	DAU	33,20 %	223,678,346
2	11	02	2	2	02	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup(RPPLH) Kab/Kota	Jumlah Dokume	Kab.Paluta		-			104,178,346
2	11	02	2	2	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	jumlah dokumen lingkungan	Kab.Paluta	1 dok	-	DAU	1 dok	55,000,000
2	11	02	2	2	02	PengendalianPelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	Kab.Paluta					49,178,346
2	11	02	2	02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis(KLHS)Kabupaten/Kota		Kab.Paluta		-			119,500,000
2	11	02	2	02	01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen	Kab.Paluta	1 dok	-	DAU	1 dok	65,000,000

2	11	02	2	02	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen	Kab.Paluta	1	1	-	DAU	1	dok	54,500,000
2	11	02	2	02	03	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang berpotensi menimbulkan dampak /resiko lingkungan Hidup		Kab.Paluta							-
2	11	03				PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	persentasepeningkatan mutu kualitas air	Kab.Paluta	25.03	%	69,278,000	DAU	25.03	%	200,000,000
2	11	03	2	01		Pencegahan Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah titik yang terpantau	Kab.Paluta	3	Sub Kegiatan	69,278,000	DAU	3	Sub Kegiatan	120,000,000
2	11	03	2	01	01	Koordinasi,Sinkronisasi,dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup di laksanakan terhadap media tanah air,udara dan laut	Jumlah Dokumen	Kab.Paluta	1	dok	69,278,000	DAU	1	dok	85,000,000

2	11	03	2	01	02	Koordinasi,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca,Mitigasi dan adaptasi peerubahan Iklim	Jumlah yang mengikuti bimbingan	Kab.Paluta	480	org		DAU		480	org	35,000,000
2	11	03	2	01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Kab.Paluta				DAU		1	unit	
2	11	03	2	02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	Kab.Paluta	3	Sub Kegiatan	-	DAU		3	Sub Kegiatan	80,000,000
2	11	03	2	02	02	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan hidup pada masyarakat	Jumlah Dokumen	Kab.Paluta	15	Unit		DAU		15	unit	40,000,000
2	11	03	2	02	02	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen	Kab.Paluta				DAU				
2	11	03	2	02	03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah sumber pencemar/atau kerusakan lingkungan hidup	Kab.Paluta	15	titik		DAU		15	titik	40,000,000

2	11	03	2	03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup/Kota		Kab.Paluta			DAU			-
2	11	03	2	03	01	Koordinasi dan sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran		Kab.Paluta			DAU			-
2	11	03	2	03	02	Koordinasi dan sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar		Kab.Paluta			DAU			-
2	11	03	2	03	03	koordinasi, sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	Jumlah pengusaha	Kab.Paluta			DAU			-
2	11	04				PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	persentase peningkatan jumlah masyarakat/lembaga yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan	Kab.Paluta	33,05 %	-	DAU		33,05 %	123,050,000
2	11	04	2	01		Pengelolaan keanekaragaman Hayati kabupaten/kota		Kab.Paluta		-	DAU			123,050,000

2	11	04	2	01	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		Kab.Paluta			DAU		-
2	11	04	2	01	02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan		Kab.Paluta			DAU		-
2	11	04	2	01	03	Pengelolaan Kebun Raya		Kab.Paluta			DAU		-
2	11	04	2	01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah Hektar	Kab.Paluta	1 ha		DAU	1 ha	100,000,000
2	11	04	2	01	06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah bibit	Kab.Paluta			DAU		23,050,000
2	11	04	2	01	07	Pengelolaan Sarana dan Prasana Keanekaragaman Hayati	jumlah sarana dan prasarana yang diadakan	Kab.Paluta		-	DAU		-
2	11	05				PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	persentase kualitas mutu kualitas udara	Kab.Paluta	30,67 %	25,750,000	DAU	30,67 %	40,000,000

2	11	05	2	01		Penyimpanan Sementara Limbah B3	terlaksananya uji laboratorium limbah	Kab.Paluta	2	Sub Kegiatan	25,750,000	DAU		2	Sub Kegiatan	40,000,000
2	11	05	2	01	01	Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	jumlah laporan keuangan	Kab.Paluta	4	kali	25,750,000	DAU		4	kali	40,000,000
2	11	05	2	02	02	Verifikasi Lapangan Untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	jumlah laporan keuangan	Kab.Paluta	4	kali	-	DAU		4	kali	-
2	11	05	2	02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Kab.Paluta			-	DAU				
2	11	05	2	02	01	Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Kab.Paluta				DAU				

2	11	05	2	02	02	Koordinasi dan sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan Pemanfaatan Pengelolaan dan/atau Penimbunan		Kab.Paluta			DAU		
2	11	06				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAHAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		Kab.Paluta		-	DAU		60,000,000
2	11	06	2	01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Kab.Paluta		-	DAU		60,000,000
2	11	06	2	01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah dokumen IKPLHD	Kab.Paluta	1 dok		DAU	1 dok	60,000,000

2	11	06	2	02	02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah yg dilatih	Kab.Paluta			DAU		-
2	11	06	2	01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yg mengikuti sosialisasi	Kab.Paluta	10 usaha		DAU	10 usaha	-
2	11	06	2	01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH		Kab.Paluta			DAU		-
2	11	07				PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH		Kab.Paluta			DAU		
2	11	07	2	01		Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH		Kab.Paluta			DAU		

2	11	07	2	01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait		Kab.Paluta				DAU			-
2	11	07	2	02		Penigkatan Kapasitas MHA, dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	laporan koordinasi perencanaan sosial budaya	Kab.Paluta				DAU			
##	###	07	2	02	01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH		Kab.Paluta				DAU			-

2	11	08				PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Kab. Paluta		-	DAU		100,000,000
2	11	08	2	01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	Kab. Paluta	3	Sub Kegiatan	-	DAU	3 Sub Kegiatan 100,000,000
2	11	08	2	01	01	Penigkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen	Kab. Paluta				DAU	15,000,000
2	11	08	2	01	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen	Kab. Paluta	4	dok	-	DAU	4 Dok 85,000,000
2	11	08	2	01	03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup		Kab. Paluta	1	keg/btg		DAU	

2	11	09				PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Kab.Paluta		-	DAU			
2	11	09	2	01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Kab.Paluta		-	DAU			
2	11	09	2	01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha / Dunia Pendidikan/ Fllantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Kab.Paluta		-	DAU			
2	11	10				PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		Kab.Paluta		-	DAU			-
2	11	10	2	01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota		Kab.Paluta		-	DAU			-

2	11	10	2	01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota		Kab.Paluta			DAU			-
2	11	10	2	01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan		Kab.Paluta			DAU			
2	11	11				PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase penanganan sampah	Kab.Paluta	30,50 %	1,510,826,000	DAU		30,50 %	699,000,000
2	11	11	2	01		Pengelolaan Sampah	Jumlah Dokumen,Jumlah Sarana Prasarana	Kab.Paluta	7 Sub Kegiatan	1,510,826,000	DAU		7 Sub Kegiatan	699,000,000
2	11	11	2	01	01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen persampahan	Kab.Paluta	113 org	-	DAU		113 org	-

2	11	11	2	01	02	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Dokumen	Kab.Paluta	1 dok		DAU			
2	11	11	2	01	03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/ TPST/ SPA/ Kabupaten/Kota		Kab.Paluta			DAU	1 lap		
2	11	11	2	01	04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlahorang/ masyarakat yg mengikuti pelatihan persampahan	Kab.Paluta	120 org		DAU	120 org		40,000,000
2	11	11	2	01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah yang menerima honor	Kab.Paluta	1356 org	1,470,826,000	DAU	480 org		504,000,000
2	11	11	2	01	06	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan		Kab.Paluta	1 dok		DAU	1320 ob		

2	11	11	2	01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/ TPS/ SPA	Jumlah prasarana dan sarana persampahan	Kab.Paluta	1 dok	40,000,000	DAU		1 dok	155,000,000
2	11	11	2	02		Penerbitan Izin Pendaaurulan Sampah/ Pengelolaan Sampah, Pengakutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah Yang di selenggarakan Oleh Swasta		Kab.Paluta	161 unit		DAU		161 dok	
2	11	11	2	02	01	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Kab.Paluta	1 keg		DAU		1 keg	
2	11	11	2	03		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah Yang Diselenggarakan Oleh Pihak Swasta		Kab.Paluta	0 dok	0	DAU		1 dok	-
2	11	11	2	03	01	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah		Kab.Paluta			DAU			
2	11	11	2	03	02	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah		Kab.Paluta			DAU			

							JUMLAH			4,813,631,011					4,951,526,638
--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	---------------	--	--	--	--	---------------

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Sebagai Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara menyusun Rencana Kerja sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara yang diharapkan dapat mendukung keberhasilan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih.

Adapun yang menjadi target kinerja prioritas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara adalah pembangunan TPA yang lahannya telah tersedia berasal dari hibah masyarakat, namun TPA tersebut masih belum dapat difungsikan disebabkan belum terbangunnya sarana dan prasarannya. Harapan kami kondisi ini akan menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara khususnya OPD yang membidangi permasalahan tersebut.

Adapun Sumber Pendanaan seluruh program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara sepenuhnya berasal dari APBD Kabupaten Padang Lawas Utara.

BAB V

PENUTUP

1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara yang didalamnya mencakup penjabaran Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang disusun secara tahunan ini agar dapat dipakai pedoman atau acuan dalam mencapai tujuan pembangunan di bidang lingkungan hidup.

Renja ini akan terlaksana apabila mendapat perhatian dari semua pihak dan tersedianya anggaran. Adanya Rancangan Renja ini diharapkan agar Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara serta seluruh aparat dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan dan adil.

2. Kaidah-Kaidah Dalam Pelaksanaan

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2023 sebagai berikut :

- a. Di dalam Penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2023 memerlukan waktu yang sangat panjang, dikarenakan harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

- b. Di dalam Penyusunan Rancangan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2023 masih jauh dari sempurna, terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pemahaman tentang tata cara penyusunan masih berbeda-beda
- c. Rancangan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2023 dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya (RPJMN, RPJMD Provinsi, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten Padang Lawas Utara, dan Renstra SKPD).

3 . Rencana Tindak Lanjut

- a. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan SKPD untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks seperti pelatihan, bimtek, sosialisasi serta kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan kinerja aparatur perencana
- b. Aparatur perencana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara yang ada saat ini dari sisi kuantitas sangat kurang, hal tersebut akan berakibatnya bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang, sehingga dianggap perlu untuk menambah pegawai agar rasio pekerjaan dan jumlah pegawai menjadi berimbang

- c. Menerapkan system Reward and Punishment terhadap seluruh staf aparatur dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja

Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu pada jadwal yang telah di tetapkan.

Ditetapkan di Gunungtua
Pada tanggal : 31 Agustus 2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA



IHPAN SIREGAR.S.Sos.M.Si
NIP. 19650903 198602 1003

--